

Pemkab Tangerang Amankan Ribuan Obat Keras Ilegal di Sepatan

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kabupaten Tangerang mengamankan sebanyak 9.500 obat keras ilegal di kawasan Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Obat-obat ilegal tersebut dipasarkan melalui toko yang berkamufase sebagai toko kosmetik.

Kepala Seksi Farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Desi Tirtawati mengatakan, tim koordinasi pengawasan obat dan makanan Kabupaten Tangerang menemukan dan menyita obat-obat tersebut dalam kegiatan rutin pengawasan dan peredaran obat di wilayah Kabupaten Tangerang. Obat-obat yang diamankan meliputi berbagai jenis obat keras.

"Dalam kegiatan rutin ini kami berhasil menemukan dan menyita sebanyak 2.500 tablet berjenis Tramadol, 4.500 butir jenis Hexymer dan 2.500 tablet obat keras lainnya," ujar Desi dalam keterangannya, Jumat (1/7).

Dia mengatakan, ketika pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap pemilik toko, yang bersangkutan sempat mengelak menjual obat-obatan terlarang. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, pemilik toko akhirnya men-

gaku kesalahannya menjual obat-obatan ilegal.

Desi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tangerang sedang gencar melakukan pengawasan terhadap peredaran obat keras ilegal. Hal itu dilakukan mengingat segala bentuk produksi obat, baik untuk kosmetik, pangan, maupun obat tradisional, harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terlebih dahulu.

"Saat ini proses tersebut sudah dimudahkan dengan adanya perizinan dari sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), karena itu para pelaku usaha harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan juga komitmen yang harus dipenuhi hingga akhirnya memiliki izin edar dari BPOM," jelasnya.

Desi memastikan pengecekan obat-obatan ilegal di pasaran di Kabupaten Tangerang akan terus dilakukan. Dengan adanya penindakan terhadap para pemilik toko yang menjual obat-obatan ilegal yang berkamufase sebagai toko kosmetik, diharapkan masyarakat bisa lebih terlindungi dalam mengonsumsi obat-obatan. ● pp

Akses Menuju SDN Pamulang Timur 01 Ditutup Tanggul oleh Ahli Waris Lahan

TANGSEL (IM)- Akses jalan menuju Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pamulang Timur 01 ditutup dengan tanggul oleh ahli waris pemilik lahan. Penutupan dilakukan pada Rabu (29/6) lalu. "Penutupan dilakukan Rabu, 29 Juni sejak pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Tujuannya untuk memperjuangkan hak milik ahli waris," ujar perwakilan ahli waris, Sarpani, Jumat (1/7).

Pantauan di lokasi, tampak tumpukan genteng merah di depan gerbang sekolah. Kemudian, terdapat tanggul drum berisi semen cor yang diletakkan di bawah gapura masuk SDN Pamulang Timur 01. Kendati demikian, jalan tersebut masih bisa diakses dengan berjalan kaki.

Sebenarnya, usaha pembuatan tanggul oleh pihak ahli waris sempat dihentikan Satpol PP Kota Tangsel. Satpol PP mengarahkan agar ahli waris lahan melakukan mediasi dengan Lurah Pamulang Timur. Kemudian, berdasarkan mediasi tersebut, pihak ahli waris lahan diencanakan untuk bertemu Pemerintah Kota Tangsel.

"Kami minta waktu seminggu untuk dipertemukan dengan pihak sekolah, dan pemkot Tangsel," jelas Sarpani. Sarpani menuturkan, lahan milik ahli waris bernama Satiri itu memiliki luas sekitar 2.700 meter. Namun, yang tercantum dalam akta tanah hanya sekitar 700 meter saja.

Sekolah yang sudah berdiri sejak 1982 itu disebut dengan berjalan kaki. Untuk membangun gedung di lahan milik Satiri. ● pp

KERAJINAN DENGAN MEMANFAKANT PARALON BEKAS

Perajin menunjukkan hasil kerajinan berbahan paralon bekas di Bugisan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, Jumat (1/7). Kerajinan miniatur motor dan mobil dengan memanfaatkan bahan paralon bekas tersebut dipasarkan dengan harga Rp150 ribu hingga Rp700 ribu tergantung jenis, detail dan tingkat kesulitannya.

Bupati: Petugas KB Garda Terdepan Atasi Kasus Stunting di Lebak

LEBAK (IM)-Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengatakan, petugas lapangan keluarga berencana (KB) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Kabupaten Lebak menjadi bagian garda terdepan untuk mengatasi kasus stunting di wilayahnya. "Kami sangat berkomitmen untuk mengendalikan kasus stunting," kata Iti saat membagikan 34 unit sepeda motor kepada petugas KB di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jumat (1/7).

Dia menegaskan, kehadiran petugas KB bagian garda terdepan untuk penanganan kasus stunting. Pasalnya, mereka bersentuhan langsung kepada masyarakat. Para petugas KB dapat memberikan penyuluhan pentingnya akseptor KB kepada pasangan usia subur (PUS), prapernikahan, juga menyosialisasikan program kesehatan kepada seluruh warga.

Selain itu, keberadaan mereka dapat melakukan pemantauan kepada ibu hamil serta pengukuran terhadap balita. "Jika ditemukan kasus ibu hamil mengalami kekurangan energi kronik (KEK) dan pengukuran balita tidak sesuai standar kesehatan maka segera ditangani dengan melibatkan petugas kesehatan untuk mengatasi kasus stunting," kata Iti.

Menurut dia, penyaluran bantuan 34 unit sepeda motor kepada petugas KB untuk kemudahan di lapangan. Pasalnya, Kabupaten Lebak memiliki topografi perbukitan dan pegunungan. Selama ini, petugas KB mampu mengendalikan penduduk hingga mengatasi kasus stunting dan gizi buruk untuk mewujudkan peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Lebak.

"Kami berharap bantuan sepeda motor itu dapat membangkitkan semangat untuk mengatasi kasus stunting," kata ketua DPD Partai Demokrat Banten tersebut.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KBP3A Kabupaten Lebak, Hj Tuti Nurashah mengatakan, pihaknya mengapresiasi pembagian sepeda motor untuk petugas KB. Pasalnya, sebanyak 34 petugas tersebut bakal menemani 126.800 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori keluarga rawan stunting. "Kita optimistis mampu pencegahan stunting 3,5 persen tahun 2022 dari 126.800 KK yang masuk kategori keluarga rawan stunting agar dengan kemudahan akses transportasi melalui bantuan sepeda motor," kata Tuti. ● pra



IDN/ANTARA

DESA WISATA DISIAPKAN UNTUK G20

Sejumlah wisatawan mengunjungi Desa Wisata Penglipuran, Bangli, Bali, Jumat (1/7). Desa wisata di Bali tersebut disiapkan untuk menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 guna mempromosikan wisata maupun produk lokal kepada dunia sehingga Indonesia kian dikenal sebagai negara yang siap mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Kejari Kab. Tangerang Tetapkan Eks Kades Bonisari Masuk DPO

Sudah kami terbitkan DPO nasional kepada yang bersangkutan. Itu karena yang bersangkutan tidak mengindahkan langkah kejaksaan secara persuasif," kata Kepala Kejari Kabupaten Tangerang, Nova Elida Saragih saat ditemui di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (1/7).

TANGERANG (IM)- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang menyatakan, eks Kepala Desa Bonisari, Kecamatan Pakuhaji, Sutisna saat ini, masuk daftar pencarian orang (DPO) ter-

kait kasus korupsi pengadaan mobil operasional desa tahun 2018. Langkah itu dilakukan setelah Sutisna tidak pernah memenuhi panggilan kejaksaan.

"Sudah kami terbitkan

DPO nasional kepada yang bersangkutan. Itu karena yang bersangkutan tidak mengindahkan langkah kejaksaan secara persuasif," kata Kepala Kejari Kabupaten Tangerang, Nova Elida Saragih saat ditemui di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (1/7).

Dia mengatakan, Sutisna telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Juni 2022 dalam kasus korupsi pengadaan mobil operasional desa. Kini, statusnya naik sebagai buronan nasional. "Karena tidak mengindahkan satu pun surat panggilan sebagai tersangka

dari penyidik. Bahkan, saat didatangi ke rumah istri pertama, kedua, dan kediaman kedua orang tuanya, Sutisna menghindari," kata Nova.

Dalam kasus tersebut, Kejari Kabupaten Tangerang telah menetapkan lima tersangka, yakni berinisial SA merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Tangerang, SN mantan Kades Pasir Gintung, M mantan Kades Gaga, DM mantan Kades Buaran Mangga, dan mantan Kades Bonisari STN atau Sutisna.

Dari ke empat orang mantan kepala desa yang juga sudah

ditetapkan tersangka, diketahui telah memberikan uang sebesar Rp 789 juta kepada tersangka SA untuk pembelian mobil. Namun, uang tersebut tidak diberikan kepada pemilik showroom mobil.

"Pengadaan barang dan jasa berupa mobil operasional desa di empat desa tersebut bermasalah. Uang dari kas desa tidak dibayarkan kepada showroom mobil," terang Nova. Negara pun mengalami kerugian mencapai Rp 600 juta atas tindakan korupsi oleh empat mantan kepala desa tersebut. ● pp

Pemkab Lebak Diguyur Bantuan Hibah Milik Negara

LEBAK (IM)- Pemerintah Kabupaten Lebak menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa 41 infrastruktur rehabilitasi dan renovasi prasarana pendidikan dan 5 infrastruktur pembangunan sarana dan bidang air minum.

Bantuan yang disalurkan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut secara simbolis diterima oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya Gedung Pendopo, Jum'at (1/7).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengucapkan, banyak terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas bantuan serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat baik melalui Kementerian PUPR dan DJKN sebagai pengelola aset negara yang sudah bekerjasama dan bersinergi dalam pembangunan di Kabupaten Lebak.

"Aset-aset yang telah dibangun ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Lebak," ungkapnya.

Dikatakan Bupati, meskipun pada tahun 2019 Kabupaten Lebak sudah keluar dari predikat kabupaten tertinggal, tetapi dari sarana pendukung terutama kebutuhan dasar masyarakat masih banyak sekali PR untuk bisa diselesaikan bersama.

"Kami berharap ini tidak menjadi akhir, tetapi terus secara continue untuk membantu kami, sehingga Kabupaten Lebak bisa meningkatkan derajat hidupnya terutama baik dari sisi pendidikan, kesehatan serta ekonominya," ujarnya.

Sementara, Kepala BPPW Banten, Moh. Yoza Habiebie berharap, seluruh masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dapat merawat dan menjaga aset yang telah dihibahkan ini, serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

"Besar harapan kami terutama kepada masyarakat Kabupaten Lebak, bisa memanfaatkan aset atau investasi yang telah kita bangun, dan pastinya kami juga berharap Pemkab Lebak bisa memelihara dan menjaga dengan baik," harapnya. ● pra

Dindik Kota Tangerang: PPDB Sudah Sesuai Prosedur

TANGERANG (IM)- Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang, Jamaluddin menegaskan, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD maupun SMP negeri tahun 2022, sudah sesuai dengan prosedur. "Saya jamin tidak ada curang, sudah prosedural semua," jelasnya saat ditemui di Gedung PGRI Kota Tangerang, Jumat (1/7).

Jamaluddin mengatakan, para kepala sekolah (kepsek) tidak akan melakukan kecurangan lantaran sudah melakukan pakta integritas. "Saya yakin kepek sudah ada pakta integritas dan tidak ada kecurangan. Saya yakin semua prosedur ditempuh berdasarkan Peraturan Menteri dan juknis yang ada," imbuhnya. Jamaluddin mengungkapkan, masyarakat seharusnya memahami bahwa lulusan

murid SD yang berjumlah 32 ribu siswa, tidak dapat diakomodir seluruhnya. Pasalnya jumlah SMP negeri hanya 33 sekolah dengan daya tampung 10.782 siswa.

"Logikanya tidak mungkin (tertampung semua) dan ini kan di Kota Tangerang ada sekolah swasta. SMP swasta ada 166 sekolah. Jadi swasta bisa menampung," jelasnya.

Sebenarnya tidak ada alasan bagi siswa untuk tidak bersekolah meski tidak diterima di sekolah negeri, karena sudah ada program-program yang sangat memudahkan.

"Kita ada namanya program Tangerang Cerdas, BOP, uang pangkal. Jadi saya rasa tidak ada alasan kalau tidak sekolah. Pemerintah daerah sudah luar biasa lah," pungkasnya. ● pp

Sopir Angkot dan Taksi Online Belum Paham Aplikasi MyPertamina

BANDUNG (IM)- Sejumlah sopir angkutan kota (angkot) dan taksi online di Kota Bandung masih belum mengetahui praktik uji coba penggunaan aplikasi MyPertamina untuk setiap pembelian BBM subsidi jenis pertalite dan solar yang dimulai Jumat (1/7). Mereka menilai penggunaan aplikasi tergolong menyulitkan dan diminta untuk tidak diterapkan.

Salah seorang sopir angkot, Rahmat mengaku belum menggunakan aplikasi tersebut saat hendak membeli BBM jenis pertalite. Sebab dia belum tahu. Ia pun belum mengetahui cara mendaftarkan diri ke aplikasi MyPertamina untuk tiap pembelian pertalite atau solar.

"Boleh-boleh saja, harus gitu ya? Pendaftarannya lewat MyPertamina?" ujarnya sekuat tenaga membeli BBM di salah satu SPBU di Jalan Riau Bandung, Jumat (1/7).

Di kalangan sopir angkot sendiri, ia mengaku masih banyak yang keberatan dengan penggunaan aplikasi tersebut. Rahmat sendiri berharap agar kebijakan penggunaan aplikasi

tidak diberlakukan untuk sopir angkot. "Ada sih (keberatan), angkot mah gak usahlah," katanya.

Sementara itu salah seorang sopir taksi online Asep mengaku belum mengetahui aplikasi tersebut. Ia merasa pengunaannya tergolong menyulitkan. "Belum tahu, ribet," katanya. Ia pun berkeluh kesah dengan kondisi taksi online yang tengah menurun. "Ribet, apalagi sekarang pusing sopir online ditambah ini ribet," katanya.

Pengawas salah satu SPBU di Jalan Riau, Kota Bandung, Tedi Setiadi mengatakan masih banyak konsumen yang bertanya-tanya tentang aplikasi MyPertamina tersebut. Selain itu banyak yang mengalami kendala saat mendaftar yaitu error disebabkan jaringan telekomunikasi yang jelek.

"Banyak yang nanya-nanya (aplikasi), kita jelaskan daftarnya dulu. Sebagian kadang error kalau koneksi jelek," katanya.

Ia mengatakan pihaknya mengarahkan konsumen untuk daftar terlebih dahulu di web-

site subsidiempat.mypertamina.id. Selanjutnya konsumen akan mendapatkan barcode yang dapat digunakan tiap transaksi pertalite atau solar. "Nanti ke depan yang mau ngisi pertalite pakai barcode," katanya. Uji coba penggunaan MyPertamina hingga 15 Juli mendatang dan mulai resmi berlaku.

Sebelumnya, Kepala Disdagin Kota Bandung, Ely Wasliah mengatakan Kota Bandung menjadi salah satu wilayah yang melakukan uji coba penggunaan aplikasi MyPertamina bagi konsumen yang menggunakan kendaraan roda empat dan akan membeli pertalite atau solar.

Ia mengatakan uji coba penggunaan aplikasi tersebut di Jawa Barat berada di empat wilayah yaitu Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Sukabumi.

Diharapkan penggunaan aplikasi tepat sasaran. "Harapannya agar penyaluran subsidi tepat sasaran, tidak ada yang menjual kembali dan tidak disalahgunakan kembali dan ketersediaan bagi yang berhak," ungkapnya. ● pur



IDN/ANTARA

WISATA TRACKING MANGROVE DI KENDARI

Foto udara lokasi wisata tracking mangrove di Teluk Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/7). Lokasi wisata tracking mangrove Teluk Kendari mulai sepi pengunjung akibat akses jalan berbahan kayu yang menyusuri kawasan tersebut mulai rusak.